
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN BONE BOLANGO

Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Rusli Isa, Juriko Abdussamad, Arif Bobihu, Mutia
Hunaini

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo

fenti@ung.ac.id¹, rosman.ilato@ung.ac.id², [rusli isa@ung.ac.id](mailto:rusli_isa@ung.ac.id)³,
jurikoabdussamad@ung.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango, dengan menggunakan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengabsahan data meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, Peningkatan ketekunan dan triangulasi), transferabilitas (validitas eksternal), reliabilitas, dan confirmability. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah sebagai regulator, belum optimal meskipun sudah ada regulasi namun penyelenggaraan pariwisata belum terkelola dengan baik. (2) Peran pemerintah sebagai dinamisator sudah optimal, hal ini ditunjukkan dengan adanya program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan rutin setiap tahun sehingga berdampak pada meningkatkan Pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango. (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah optimal hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai program diantaranya penyediaan fasilitas pemasaran pariwisata yang berbasis Teknologi Informasi, dan (4) Peran pemerintah sebagai katalisator dalam mempercepat pengembangan potensi daerah meskipun sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini diakibatkan oleh penolakan masyarakat pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pajak retribusi masuk ke tempat obyek wisata.

Kata Kunci: **Peran Pemerintah, Pengembangan Potensi, Pariwisata, Kawasan Pesisir**

ABSTRACT

This study aims to describe the Government's Role in the Development of Tourism Potential in the Coastal Area of Bone Bolango Regency, using a qualitative descriptive method and approach. To obtain data used data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. As for the data validation techniques include

credibility tests (extended observations, increased persistence and triangulation), transferability (external validity), reliability, and confirmability. The data analysis technique used is an interactive model consisting of reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that (1) the government's role as a regulator is not optimal even though there are regulations, but the implementation of tourism has not been well managed. (2) The government's role as a dynamicator is optimal, this is indicated by the existence of programs organized by the Tourism and Creative Economy Office of Bone Bolango Regency which are carried out routinely every year so that they have an impact on improving services for visiting tourists at every tourist attraction in Bone Bolango District. (3) The government's role as a facilitator has been optimal, this can be seen by the existence of various programs including the provision of Information Technology-based tourism marketing facilities, and (4) The government's role as a catalyst in accelerating the development of regional potential even though it has been implemented but has not been optimal. This is caused by the rejection of the business community towards government policies regarding the application of retribution taxes to tourist attractions.

Keywords: Government Role, Potential Development, Tourism, Coastal Areas

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa: penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Sehingga pengembangan potensi pariwisata menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah termasuk Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bone Bolango tersebar di beberapa wilayah, salah satunya adalah di sepanjang Pesisir Pantai Teluk Tomini yaitu dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bulawa yang merupakan wilayah paling ujung di bagian Selatan Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan langsung

dengan Propinsi Sulawesi Utara. Sebagai potensi unggulan pariwisata Provinsi Gorontalo, kondisi daya tarik wisata yang berada di kawasan pesisir pantai yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi pariwisata di kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango sangat beragam mulai dari wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya hingga wisata bahari (Eraku et al., 2020) Keragaman potensi tersebut merupakan modal yang besar dalam pengembangan daya tarik wisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Keragaman potensi tersebut merupakan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan. Namun pengembangan potensi kekayaan alam dan budaya tersebut baru sebagian kecil yang dikelola sebagai daya tarik wisata.

Dari data yang diperoleh bahwa di sepanjang pesisir pantai Teluk Tomini yang berada di Kabupaten Bone Bolango terdapat beberapa desa yang memiliki potensi sebagai wisata bahari (*Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2021, Tentang Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Bone Bolango*, n.d.). Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	Desa	Kecamatan	Keunikan
1	Botubarani	Kabila Bone	Hiu Paus (<i>Whale Shark</i>), Pantai Kurinai, Pucak Botubarani, Terumbu Karang
2	Botutonuo	Kabila Bone	Pantai, Perahu wisata, Transpantasi Terumbu Karang, kuliner
3	Molutabu	Kabila Bone	Pantai, Perahu wisata, Kerajinan, Terumbu Karang, kuliner
4	Olele	Kabila Bone	Taman Laut, Karatamaran, Diving, Snorkling, Kerajinan, Kuliner
5	Pinomontiga	Bulawa	Pasir Putih, Terapi pasar, Kuliner

Sumber: Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2021 tentang Potensi pariwisata di wilayah

Potensi Pariwisata di Kabupaten Bone Bolango cukup prospektif. Hal ini dapat dilihat melalui Realisasi Target Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan capaian kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang cenderung naik setiap tahun. Hal ini ditunjukkan melalui data jumlah kunjungan wisatawan pada tabel 2 berikut:

No	Indikator	Realisasi Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	136.694	42.094	250.019	330.247	280.000

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango merupakan kawasan yang memiliki potensi pariwisata yang tentu saja akan memiliki dampak bukan hanya pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal namun lebih jauh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hasil penelitian (Marwan & Isnaeni, 2022) menjelaskan bahwa paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai proses dan tujuan pembangunan di sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi secara integral juga dapat mengedepankan aspek kesejahteraan sosial, khususnya yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat lokal, terutama kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat, dan lebih dari itu mampu melindungi kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan dalam pengembangan potensi pariwisata, selain kurangnya kemampuan manajemen yang dimiliki pengelola tempat wisata dan keterbatasan sarana prasarana, maka peran pemerintah juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan potensi pariwisata. Peran pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk dapat

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Tabanal et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata di kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango dengan sub fokus: (1) Peran pemerintah sebagai regulator, (2) Peran pemerintah sebagai dinamisor, (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator, (4) Peran pemerintah sebagai katalisator (Firdaus, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena fenomena yang terjadi di lapangan sesuai fokus penelitian (Tui et al., 2022) yakni peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah desa dan masyarakat lokal pengelola obyek wisata di kawasan pesisir Pantai Kabupaten Bone Bolango.

Sedangkan untuk teknik pengabsahan data meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, Peningkatan ketekunan dan triangulasi), transferabilitas (validitas eksternal), reliabilitas, dan confirmability. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar sebagai instrument untuk mengatur sebagai kegiatan pengembangan potensi pariwisata sehingga dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu unit kerja di bawah Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang merupakan penjabaran dan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kebijakan berupa regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango di antaranya: (1) Peraturan Daerah Bone Bolango No 12 Tahun 2007 tentang Kepariwisataaan, (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Obyek Wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi namun penyelenggaraan pariwisata belum terkelola dengan baik. Kondisi empirik menunjukkan bahwa potensi wisata di kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango belum memberikan kontribusi yang optimal kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan obyek wisata di kawasan pesisir pantai dilakukan secara

mandiri oleh masyarakat tanpa melibatkan pihak pemerintah. Berbagai pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango melalui pemerintah desa maupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya merangkul masyarakat agar dapat bersama-sama mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bone Bolango di antaranya melalui sosialisasi dan pemberian bantuan, namun belum menghasilkan kesepakatan sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat pelaku usaha dengan pihak pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten.

Salah satu faktor penyebab timbulnya konflik pada pengelolaan wisata di pesisir pantai Kabupaten Bone Bolango adalah kurang efektifnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Maku & Parino, 2018). Kurang efektifnya komunikasi antara pemerintah desa menyebabkan tidak optimalnya proses implementasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan proses pengembangan pariwisata di kawasan pesisir pantai kabupaten Bone Bolango

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat pelaku usaha wisata biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha untuk menunjang program dan kegiatan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui berbagai pelatihan di antaranya berupa: (1) Pelatihan Manajemen *Home Stay*, (2) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (3). Pelatihan Pemandu Wisata Selam.



Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Selam



Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai dinamisor sudah optimal. Melalui program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone yang dilakukan rutin setiap tahun diharapkan dapat mendongkrak pengetahuan dan Keterampilan Kelompok peserta pelatihan dalam hal ini diikuti oleh Kelompok Sadar Wisata dan Aparat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat pelaku pariwisata juga Aparat yang terkait makan akan meningkatkan Pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wisata. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango sebagai fasilitator juga dilakukan melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas pemasaran pariwisata yakni dengan meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata, Promosi dilakukan melalui dua Media yaitu media cetak dan media elektronik antara lain Radio, Televisi, Liflet dan Banner. Dampak dari Promosi ini membuat semua obyek wisata di Kabupaten Bone Bolango dibanjiri pengunjung. Selain itu juga Bidang Promosi dan Pemasaran selalu melakukan kegiatan-kegiatan promosi melalui Lomba Foto *underwater* yang melibatkan masyarakat umum. Kontes tersebut merupakan salah satu sarana, untuk mengenalkan kekayaan beragam biota dan taman Laut Olele. Karya Fotografi sebagai Produk ekonomi kreatif sangat efektif untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango.

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah. Pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan potensi pariwisata. Berbagai hal yang menjadi permasalahan yang menghambat upaya pengembangan potensi wisata di pesisir pantai di antaranya kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan obyek wisata serta kurangnya penguatan kebijakan dari pemerintah daerah (Abdussamad et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalisator dalam mempercepat pengembangan potensi daerah meskipun sudah terlaksana namun belum optimal. Meskipun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah banyak program kegiatan yang telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Potensi Wisata yang ada di kawasan Pesisir Kabupaten Bolango belum memberikan dampak positif

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diakibatkan oleh penolakan masyarakat pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pajak retribusi masuk ke tempat obyek wisata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian tentang peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata di kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa: (1) (1) Peran pemerintah sebagai regulator, belum optimal meskipun sudah ada regulasi namun penyelenggaraan pariwisata belum terkelola dengan baik. Pengelolaan obyek wisata di kawasan pesisir pantai dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa melibatkan pihak pemerintah sehingga tidak berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah; (2) Peran pemerintah sebagai dinamisor sudah optimal, hal ini ditunjukkan dengan adanya program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone yang dilakukan rutin setiap tahun diharapkan dapat mendongkrak pengetahuan dan Keterampilan Kelompok peserta pelatihan dalam hal ini diikuti oleh Kelompok Sadar Wisata dan Aparat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango yang berdampak pada meningkatkan Pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango; (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah optimal hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas pemasaran pariwisata yakni dengan meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata; (4) Peran pemerintah sebagai katalisator dalam mempercepat pengembangan potensi daerah meskipun sudah terlaksana namun belum optimal. Meskipun telah banyak program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif namun Potensi Wisata yang ada di kawasan Pesisir Kabupaten Bolango belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diakibatkan oleh penolakan masyarakat pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pajak retribusi masuk ke tempat obyek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Juriko & Winda, 2022: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango
- Eraku, Sunarty Suly, dkk. 2019. Potensi Ekowisata Pantai Molotabu Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan Analisis Spasial Ekologis
- Maku, D & Agus Pariono. 2018 Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango
- Marwan, Isnaeni, Nurul. 2022. *Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah Dalam Kemitraan Multipihak Untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi)*, Wakatobi
- Tabanal, Andika, Abdussamad, Juriko, Tui, Fenti Prihatini (2021) Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
- Tui, Rosman Ilato, Andi Yusuf Katili. 2022. Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Potensi Pariwisata Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
- LAKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021